

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting karena disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan sangat berguna terutama untuk nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional pemerintahan, seperti menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan pemerintahan yaitu perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai banyak kewajiban mengenai laporan keuangan, salah satunya untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan secara sistemasi yang terstruktur untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya pemerintahan dalam keseimbangan generasi selanjutnya.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaporannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menarik untuk diteliti yaitu penerapan Permendagri no. 64 Tahun 2013 mengenai standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada kantor pemerintahan daaerah tersebut. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun keputusan politik. Salah satu instansi pemerintah di kota Palembang

yang menyajikan penerapan laporan keuangan yaitu kantor Dinas Pendidikan kota Palembang. Dinas Pendidikan kota Palembang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendidikan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dinas Pendidikan kota Palembang merupakan salah satu organ pemerintahan kota Palembang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dengan tanggung jawab pokok sebagai mana instansi oemerintah lainnya yang menciptakan pelayanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya

Pada kantor Dinas pendidikan memiliki data laporan keuangan yang belum diaudit oleh pemerintah, dan laporan tersebut akan diaudit dan disimpan sangat rahasia oleh pemerintahan yang bersangkutan. Dinas pendidikan kota palembang sudah menerapkan Standar Akuntansi berbasis AkruaI dan menggunakan sarana yang memadai dan mendukung pelaksanaannya. Namun bagian keuangan kantor dinas pendidikan hanya menyimpan data yang belum diaudit oleh pemerintah karena data yang telah diaudit dan diotorisasikan bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan. Selain laporan keuangannya, pada pemerintahan juga memiliki sumber daya manusia yang juga mempunyai peran untuk meyakinkan organisasi dan tenaga kerja mengetahui peraturan dalam pelaporan keuangan. Faktanya tidak

semua sumber daya manusia memahami tentang penerapan laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini membahas variabel-variabel yang biasanya berhubungan dengan laporan keuangan dalam instansi pemerintahan Dinas Pendidikan kota Palembang. Variabel yang berpengaruh terhadap pelaporan instansi pemerintahan menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO) pada Dinas Pendidikan kota Palembang. Alim (2008:74) menjelaskan bahwa “anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan”. Dari pengertian tersebut, maka laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selain laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan penerapannya, dalam SAP struktur laporan keuangan, format laporan keuangan, isi dari laporan keuangan, periode pelaporan keuangan yang disajikan harus sesuai dan tepat waktu, dan unsur-unsur dalam laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan dan mengetahui penerapannya sudah sesuai dengan yang seharusnya.

Pada kerangka konseptual PP No 71 Tahun 2010 paragraf 64-65 dikatakan bahwa “ neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu”. setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tidak lancar serta kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dalam neraca. Laporan neraca harus ada dalam setiap perusahaan baik itu instansi pemerintahan, bahkan pengerjaannya harus diberikan kepada tenaga yang memang ahli dan jujur. Selain itu, pengguna laporan juga membutuhkan laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan seluruh entitas pemerintahan. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Motivasi yang melandasi alasan peneliti melakukan lebih lanjut penelitian ini yaitu permasalahan tentang pencatatan dan menyusun pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri no.64 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Peneliti menemukan masalah pada penyusunan laporan keuangan tahunan pada Dinas Pendidikan kota Palembang, dimana laporan tersebut tidak disajikan secara tepat waktu, padahal seharusnya pelaporan keuangan disusun tepat pada waktunya karena akan digunakan untuk yang berkepentingan. Pada Laporan

realisasi Anggaran, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Anita Widiyana (2016) yang berjudul “Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja Pada Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga kota Palembang” menemukan bahwa pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2014 tingkat efektifitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja.

Kinerja dinas pendidikan kota Palembang dinilai publik begitu buruk, hal ini ditandai dengan terdapat indikasi penyelesaian paket pekerjaan pada dinas pendidikan yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan, adapun nilainya minimal sebesar Rp 196.562.940,00 (klikanggaran.com, 02 Maret 2019). Badan Pemeriksa keuangan masih menemukan berbagai permasalahan seperti, peneglolaan kas, pengelolaan piutang, peneglolaan aset tetap, pengelolaan pendapatan, dan pengelolaan belanja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan kota Palembang. Saldo awal kas dan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2017 tidak sesuai sisa dana BOS tahun anggaran 2016 yang dilaporkan Dinas Pendidikan dan sekolah, dan itu akan mempengaruhi pelaporan keuangan. Pada laporan Neraca masih ditemukan aset tetap yang dicatat secara gabungan, dan tidak ditemukan keberadaannya dan dikuasai pihak lain (www.detiksumsel.com oleh Efen Permata, 14 September 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi novita sari dan Elsa fitri amran (2018) “menurut pernyataan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, laporan keuangannya pada tahun anggaran per 31

Desember 2016, mendapatkan hasil audit oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada tahun anggaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, anggaran yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, hanya 95,32% saja yang dapat terealisasi, hal ini terjadi akibat dari ada kegiatan yang termasuk kedalam belanja aset tetap lainnya yang hanya terealisasi sebesar 14,25% sehingga anggaran yang diberikan tidak dapat terealisasi sebesar 100% ". Masalah lainnya yang terjadi dikantor pemerintahan yaitu tidak sesuainya praktik di lapangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijadikan dasar perlakuan akuntansi. Selain itu, pada tahun 2018 pada kantor pendidikan Sumsel terdapat hasil pemeriksaan BPK mengenai belanja langsung dana BOS dan PSG yang tidak diyakini kewajarannya, hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian atas pencatatan realisasi anggaran dana BOS dan PSG oleh kepala dinas pendidikan Pemprov Sumsel. Masalah tersebut menimbulkan adanya dugaan kurangnya penyusunan laporan realisasi anggaran di Dinas pendidikan Pemprov Sumsel sesuai Standar yang berlaku.

Selain itu, pada faktanya dilingkungan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, karakteristik laporan keuangan merupakan syarat normative yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu : Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Penerapan Permendagri no. 64 tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Dinas Pendidikan kota Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah penerapan dan pencatatan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan kota Palembang sudah sesuai dengan Permendagri no. 64 tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada evaluasi variabel yang digunakan yaitu Laporan Keuangan terhadap Permendagri no. 64 tahun 2013 Berbasis Akruwal pada Dinas Pendidikan kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 64 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah berbasis akrual pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang keuangan terutama masalah Penerapan pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri no. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual terutama pada Dinas Pendidikan kota Palembang.
- b. diharapkan juga dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang keuangan yang diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapatkan.
- c. Menambah dan mengembangkan lebih luas wawasan peneliti, khususnya dalam hal penerapan pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Instansi/Kantor Pemerintahan Dinas Pendidikan
Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menentukan dan penyajian/penerapan laporan keuangan sehingga penerapannya sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual.

b. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yaitu:

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian dan informasi mengenai penyajian laporan keuangan pemerintahan, terutama pada pemerintahan daerah Dinas Pendidikan kota Palembang.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara lebih mendalam, khususnya pada permasalahan yang serupa.

c. Manfaat bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori utama untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar tercapai penulisan yang sistematis mengenai pokok permasalahan ddi dalam penelitian, maka diberikan gambaran sistematika penulisan secara ringkas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian meliputi batasan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori dan teori-teori lain yang mendukung serta hasil penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka penelitian dan paradigma penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi objek penelitian, metodologi penelitian, definisi operasional variabel, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.